Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VII
Minggu ke-4 Agustus (18 s.d. 24 Agustus 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RENCANA KENAIKAN HARGA PERTALITE DAN SOLAR

Juli Panglima Saragih
Analis Legislatif Ahli Madya
juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah merencanakan akan menaikkan harga BBM tertentu (jenis BBM khusus penugasan) seperti Pertalite dan Solar bersubsidi dalam waktu dekat. Alasannya, APBN Tahun Anggaran 2022 tidak cukup kuat menanggung beban subsidi BBM sampai akhir tahun 2022. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini pemerintah sedang merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 untuk mengantisipasi atau merespons kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Jika pemerintah merevisi Perpres tersebut maka harus jelas mengenai proses pengalokasian, distribusi, dan sampai harga jual BBM bersubsidi di tingkat konsumen (pengguna akhir). Alokasi menyangkut angka volume BBM dan nilai subsidinya. Di samping itu, harus jelas *database*-nya apakah berdasarkan jumlah penduduk, jumlah kendaraan, jumlah rata-rata konsumsi BBM per hari/per bulan, atau hasil dari penelitian, serta siapa yang berhak menerima/membeli BBM bersubsidi tersebut.

Setelah pemerintah menaikkan harga Pertamax (Rp12.500) dan PertaminaDex (Rp18.900) per liter, konsumen banyak yang beralih ke BBM Pertalite (Rp7.650) dan Solar bersubsidi (Rp5.150). Hal ini mengakibatkan stok BBM Pertalite dan Solar bersubsidi sering langka atau cepat habis di beberapa SPBU termasuk di daerah. Harga BBM Pertalite lebih murah dibandingkan harga BBM per liter di beberapa negara ASEAN seperti Filipina (Rp21.350), Thailand (Rp19.500), dan Vietnam (Rp16.645). Hingga bulan Juli 2022, konsumsi Pertalite mencapai 16,8 juta kilo liter dari kuota 23 juta kilo liter untuk tahun 2022 dan konsumsi Solar bersubsidi mencapai 9,9 juta kilo liter dari kuota 14,91 juta kilo liter untuk tahun 2022. Kuota Pertalite hanya tersisa sebesar 6,2 juta kilo liter dan kuota Solar bersubsidi hanya tersisa sebesar 5,01 juta kilo liter sampai akhir tahun 2022.

Sejak Januari-Juli 2022, pemerintah menahan kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga terjadi kenaikan subsidi energi di APBN Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp502 triliun. Kebijakan ini ditempuh untuk menahan laju inflasi yang sudah disepakati oleh DPR bersama pemerintah sebesar 3%. Data BPS menunjukkan angka inflasi pada bulan Juli 2022 lalu sebesar 4,94%. Walaupun angka inlasi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di dunia, tetapi sudah melampaui target APBN Tahun 2022 dan target pemerintah sebesar 4% (3%+1).

Saat ini pemerintah menghadapi dilema yang tidak mudah. Jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi maka pasti akan terjadi kenaikan harga barang-barang tidak hanya kebutuhan pokok. Tetapi jika dibiarkan terus subsidi dalam APBN Tahun Anggaran 2022 maka beban anggaran negara semakin bertambah. Pemerintah merencanakan akan memangkas subsidi BBM pada RUU APBN Tahun Anggaran 2023 menjadi 336,7 triliun. Tetapi hal ini masih dibahas oleh Badan Anggaran DPR RI. Masyarakat saat ini sampai September 2022 masih menunggu keputusan pemerintah apakah menaikkan harga BBM Pertalite dan Solar bersubsidi atau tidak. Pemerintah perlu hati-hati menetapkan harga kedua jenis BBM tersebut, karena jumlah konsumsi kedua jenis BBM ini sampai Agustus 2022 meningkat drastis.

Atensi DPR

DPR perlu mendesak pemerintah untuk memastikan apa strategi kebijakan pemerintah yang akan ditempuh dalam menghadapi kebijakan subsidi BBM sampai akhir Desember 2022 dan pada RAPBN Tahun Anggaran 2022. Sebab kuota BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) sudah hampir habis sebelum akhir tahun 2022. Di samping itu, anggaran subsidi energi termasuk beban subsidi BBM sudah mencapai lebih dari Rp500 triliun. Untuk meredam dan mengurangi beban subsidi BBM dalam anggaran negara maka jalan satu-satunya adalah menaikkan harga kedua jenis BBM tersebut melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Tetapi kenaikan harganya hendaknya harus tetap dibawah harga keekonomian dari jenis Pertalite dan Solar. DPR juga perlu mengusulkan berapa "harga yang pas" untuk BBM bersubsidi jika pemerintah akan menaikkan harga. Atensi lain yang perlu adalah DPR harus memastikan jika harga kedua jenis BBM tersebut naik, distribusinya ke masyarakat harus lancar dan tersedia.

Sumber

Buletin Parlementaria, Agustus 2022;
Kompas, 16 dan 19 Agustus 2022;
Media Indonesia, 13 dan 19 Agustus 2022; dan
Republika, 12, 13, dan 18 Agustus 2022.

Minggu ke-4 Agustus
(18 s.d. 24 Agustus 2022)

2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2022

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Edmira Rivani
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.